BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pembangunan suatu bangsa tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari pemerintah yang ada dibawahnya, hal tersebut tentunya hanyalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga keutuhannya.

Sehubungan dengan adanya reformasi, Pemerintahan Republik Indonesia telah menerbitkan dua undang – undang yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem pemerintahan dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan telah terjadi desentralisasi sehingga memberikan kemudahan kontrol dibanding dengan sentralisasi, setelah diberlakukannya undang undang tersebut

maka Pemerintah Daerah telah diberikan tanggung jawab yang mengharuskan Pemerintah Daerah lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan yang merupakan konsekuensi dari otonomi daerah (Dora, 2017). Perubahan sistem pemerintahan membawa juga perubahan pada sistem hubungan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun Kota, untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Tujuan otonomi daerah ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan terbentuknya sarana dan prasarana di daerah yang layak. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efektif serta memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan kualitas dan daya saing daerah otonom semakin meningkat dan juga dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang

baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sebagai salah satu cara untuk pemerintah daerah mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan penatausahaan atau akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan otonomi daerah sendiri tidak terlepas dari peran pemerintahan dalam mengelola keuangannya. Dan melalui pengelolaan keuangan daerah tersebut pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerahnya untuk membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa uang atau dana publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat mencapai good governance. Terkait dengan standar akuntansi ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyajikan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAP 01 yaitu terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Untuk mengetahui apakah pengelolaan APBD telah dimanfaatkan dengan baik perlu dilakukan pengukuran sejauh mana kinerja APBD tersebut. Analisis kinerja keuangan berfungsi untuk mengukur kinerja yang telah terjadi agar memperoleh informasi keuangan yang mewakili entitas dan potensi kinerja (Labi, 2019). Analisis ini penting dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah serta mengukur keberhasilan yang dilakukan pemerintah daerah. Perbandingan pendapatan asli daerah terhadap jumlah pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah pendapatan maka tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi, yang berarti bahwa belanja daerahnya semakin banyak didanai dari pendapatan asli daerahnya (Ishak et al., 2020).

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah karena pada laporan tersebut menyediakan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah (Assidiqi, 2016). Anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada suatu anggaran. Pengukuran kinerja keuangan memiliki dua

tujuan, yaitu pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dan untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset.

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : “Pengertian kinerja Keuangan pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi”.

Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011:2).

Menurut (Heriristam, 2015) “Menyatakan kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-

sumber keuangan asli daerah daerah guna memenuhi kebutuhannya dan untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan". Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Lahirnya otonomi daerah di Indonesia mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan dan sistem keuangan pada Kabupaten Belu, karena itu Pemerintah Kabupaten Belu sebagai pihak yang diserahi tugas dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Kota Belu berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau

tidak. Oleh karena itu analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk melihat apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD dengan ekonomis, dan sebaik mungkin, tidak mengeluarkan anggaran yang tidak diperlukan dan menghindari pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karlina dan Handayani (2017) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015, hasil penelitian menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surabaya secara umum dikatakan Kurang baik dalam varians pendapatan. Kusumadewi dan Ilat (2016) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014, hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah dalam mengelola pendapatannya dikatakan baik ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan.

Berdasarkan dengan fenomena, latar belakang, dan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu (tahun 2019-2022)**”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menganalisis **kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Belu (tahun 2019-2022).**

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian diatas, yang menjadi persoalan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Belu selama periode 2019-2022 ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belu selama periode 2019-2022 ?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan persoalan penelitian diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Belu selama periode 2019-2022.
2. Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belu selama periode 2019-2022.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1). Manfaat Akademis

Secara akademik penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana khususnya bagi jalur minat Akuntansi Sektor Publik tentang analisis kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Belu tahun 2019-2022

2). Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana analisis kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Belu tahun 2019-2022. Diharapkan juga hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.